

# ANALISIS PENGELOLAAN DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA WIDYA ARTHA WIGUNA DESA PENUKTUKAN

L.S.A Muliantari<sup>1</sup>, I.N Suarmanayasa<sup>2</sup>, N.K Sinarwati<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Program Magister Manajemen, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

e-mail: sri.astri@undiksha.ac.id, nengah.suarmanayasa@undiksha.ac.id, nikadeksinarwati@undiksha.ac.id

## Abstrak

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan akuntabilitas laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Widya Artha Wiguna Desa Penuktukan Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Data hasil penelitian dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dengan sample menggunakan teknik purposive sampling. Informan penelitian adalah ketua BUMDes, bendahara, sekretaris, kepala desa selaku penasehat, pengawas, dan masyarakat pengguna unit usaha BUMDes. Berdasarkan hasil wawancara yang didasari oleh indikator pengelolaan, tata cara pendirian, pengurusan dan pembubaran BUMDes Widya Artha Wiguna saat ini sudah sesuai dengan Permendesa No. 4 tahun 2015. Sementara untuk akuntabilitas laporan keuangan, pihak pengelola BUMDes sudah membuat laporan keuangan yang dilaporkan baik secara vertikal (internal) dan akuntabilitas horizontal (eksternal) juga sudah dilakukan, tetapi belum disebarluaskan ke masyarakat umum berupa unggahan di website desa.

**Kata kunci:** pengelolaan, akuntabilitas, keuangan, bumdes.

## Abstract

*This quantitative descriptive reseach aims to analyze the management and accountability of financial statements at the Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Widya Artha Wiguna Desa Penuktukan Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. The research data were collected using an interview technique with a sample using a purposive sampling technique. Research informants are the leader of the BUMDes, treasurer, secretary, village leader as advisor, supervisor, and community users of the BUMDes business unit. Based on the results of interviews based on management indicators, the procedures for establishing, managing and dissolving BUMDes Widya Artha Wiguna are currently in accordance with Permendesa No. 4 years 2015. Meanwhile, for the accountability of financial reports, the BUMDes management has made financial reports that have been reported both vertically (internally) and horizontally (externally) have also been carried out, but have not yet been disseminated to the general public in the form of uploads on the village website.*

**Keywords :** management, accountability, finance, BUMDes

## 1. Pendahuluan

Program *Nawa Cita* Presiden Republik Indonesia di bidang ekonomi adalah untuk menciptakan kemandirian dan mencegah kesenjangan ekonomi di desa dan di kota. Pembangunan ekonomi di desa mutlak harus dilakukan sehingga pemerintah desa harus dapat menggali potensi yang ada di desanya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan diri di bidang ekonomi yang akan berdampak baik pada kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa bisa di tingkatkan dengan mengembangkan berbagai macam wirausaha desa seperti pertanian, peternakan, simpan pinjam, pengelolaan air bersih, kredit usaha mikro, perkebunan dan wisata.

Desa Penuktukan adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Tejakula, sebuah kecamatan yang berada pada bagian timur Kabupaten Buleleng Bali, berdekatan dengan perbatasan Kabupaten Karangasem. Desa Penuktukan sudah mempunyai BUM Desa dengan nama Widya Artha Wiguna, dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Badan Usaha Milik Desa dan diperkuat dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Penuktukan.

Salah satu yang menyebabkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bisa berkembang atau tidak adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan yang di wujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang disampaikan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Menurut Murniati AR, pengelolaan adalah proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya, baik manusia maupun teknikal, untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Follet dalam Nurliani, dkk (2018) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa yang dijabarkan menurut (Sinarwati, 2021:32) adalah sebagai berikut: (a) Kooperatif; (b) Partisipatif; (c) Emansipatif; (d) Transparan; (e) Akuntabel; (f) Sustainabel.

Lebih lanjut pengelolaan BUMDes membutuhkan akuntabilitas yang memadai. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat pertanggungjawaban serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi pada masa yang akan datang. Menurut Mahmudi (2013) akuntabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu: (1) Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*), yakni akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi; (2) Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*), adalah bentuk akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Ira Indriyanti, Nurabiah dan Wirawan Suhaedi (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan maupun akuntabilitas dari laporan keuangan BUMDes belum berjalan dengan baik menyebabkan BUMDes tidak maksimal. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Jeacklin Valenia Mamuaya, Harijanto Sabijono, dan Hendrik Gamaliel (2017), menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dan belum adanya pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono dan Darwanto (2016), menunjukkan bahwa kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka. Penelitian lain dilakukan oleh Ni Luh Putu Ayu Diah Puspayanthi, Made Arie Wahyuni dan Made Aristia Prayudi (2017), menunjukkan bahwa penguatan pengelolaan keuangan desa optimalisasi peran BUMDes berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian desa.

Masalah pengelolaan BUMDes Widya Artha Wiguna yang ada di Desa Penuktukan adalah masih terdapatnya rangkap jabatan dalam manajemen pengelolaan BUMDes dan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui pelaporan keuangannya. Perlu dilakukan kajian terkait pengelolaan manajemen BUM Desa Widya Artha Wiguna Desa Penuktukan menurut Permendes No 4 tahun 2015. Serta bagaimana akuntabilitas laporan keuangan BUM Desa Widya Artha Wiguna bagi masyarakat desa Penuktukan. Berdasarkan penelitian terdahulu beserta fenomena-fenomena yang mendukung untuk dilakukan penelitian secara lebih lanjut mengenai bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan BUM Desa Widya Artha Wiguna, yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah desa dan masyarakat tentang pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan BUM Desa.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan deskriptif pada metode penelitian kualitatif merupakan tipe pendekatan yang di mana data yang didapat oleh peneliti berbentuk kata-kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka. Subjek pada penelitian ini adalah Ketua BUMDes Widya Artha Wiguna, Sekreris BUMDes, bendahara BUMDes, kepala Desa Penuktukan, dan penasehat BUMDes serta masyarakat pengguna BUMDes. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini adalah (1) *key instrument*, yakni peneliti yang berperan sebagai alat

utama dalam penelitian; dan (2) pedoman wawancara. Alat bantu pengumpulan data berupa alat perekam wawancara dan alat pengambilan gambar foto maupun video. Teknik analisis data penelitian menggunakan model dari Miles and Huberman dengan empat tahapan, yakni (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; dan (4) penarikan kesimpulan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pendirian BUM Desa Widya Artha Wiguna didasari oleh terbitnya peraturan menteri desa No. 4 tahun 2015, tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Widya Artha Wiguna Desa Penentuan pemilihan kepengurusan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama-sama dengan aparat desa Penentuan yang secara musyawarah menyepakati nama-nama yang akan menduduki jabatan sebagai pengurus BUM Desa. Setelah itu BPD, aparat desa bersama dengan unsur masyarakat desa bermusyawarah untuk menentukan aturan atau menentukan AD/ART sebagai jalur untuk menentukan bagaimana mekanisme ke depannya dalam menjalankan BUM Desa.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola BUMDes Widya Artha Wiguna Desa Penentuan diperoleh informasi bahwa bentuk pelaporan tata kelola manajemen BUM Desa baik itu berupa laporan keuangan dan yang lainnya dari pengelola BUMDes. Setiap bulan menyerahkan pelaporan ke pemerintah desa sampai di akhir tahun. Setelah tahun buku, pengelola BUMDes bersama dengan pemerintah desa wajib melakukan musyawarah terkait dengan pelaporan keuangan BUMDes, sebagai bentuk pertanggungjawaban selama satu tahun. Dalam musyawarah itu dihadiri oleh aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, unsur-unsur masyarakat dari kelompok tani, nelayan, dan elemen lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan sampel masyarakat selaku nasabah BUMDes Widya Artha Wiguna Desa Penentuan diperoleh informasi bahwa masyarakat memperoleh manfaat BUMDes. Sebagian besar masyarakat menggunakan unit usaha air bersih yang dikelola oleh BUMDes. Masyarakat juga telah memanfaatkan unit simpan pinjam yang ada di BUMDes. Namun untuk laporan keuangan masyarakat Desa Penentuan menyatakan tidak mengetahuinya.

Laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) diatur dalam permendesa no 4 tahun 2015 pasal 12 angka (3) huruf a., yang menyatakan bahwa pelaksana operasional BUM Desa berwenang membuat laporan keuangan seluruh unit yang ada di BUM Desa setiap bulan. Pada BUM Desa Widya Artha Wiguna laporan keuangan dibuat per bulan, dan setiap tahun yang diserahkan ke aparat pemerintahan desa, dalam bentuk dokumen tertulis. Laporan keuangan ini dibuat oleh ketua BUM Desa, yang berisi seluruh kegiatan yang telah dikerjakan, juga memuat tentang kendala yang dihadapi, serta saran-saran yang diberikan. Pada penelitian ini penulis mendapatkan hasil bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh BUM Desa, sudah di sampaikan ke aparat pemerintahan desa, akan tetapi masyarakat desa tidak tahu menahu tentang laporan keuangan tersebut. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan semua informan dari unsur masyarakat pengguna BUM Desa yang tidak tahu tentang laporan keuangan BUM Desa.

### 4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada kajian pustaka yang relevan maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Pengelolaan BUM Desa pada BUM Desa Widya Artha Wiguna Desa Penentuan sudah sesuai dengan Permendesa No. 4 Tahun 2015. 2) Akuntabilitas laporan keuangan pada BUM Desa Widya Artha Wiguna Desa Penentuan sudah sesuai dengan Permendesa No. 4 Tahun 2015 namun masyarakat belum mengetahui laporan keuangan tersebut.

Disarankan kepada pihak pengelola BUM Desa untuk lebih memperhatikan dokumen-dokumen penting atau kearsipan yang ada pada BUM Desa. Hal ini sangat penting dalam mencari data-data agar lebih memudahkan. Pada laporan keuangan, walaupun secara horizontal sudah dilaksanakan yaitu penyampaian ke Badan Permusyawaratan Desa, tetapi

masyarakat umum tidak mengetahuinya. Saran penulis agar laporan keuangan BUM Desa juga di sampaikan melalui web desa agar masyarakat juga mengetahuinya.

### Daftar Pustaka

- Agunggunanto E. Y., Arianti, F., & Darwanto, E. W. K. 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). JDEB Vol.13 No.1 Maret 2016.
- Indriyani, N. N. I., Nurabiah, Wirawan, & Suhaedi, 2021. Analisis Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Gunungsari kabupaten Lombok Barat. Jurnal Risma Vol.1 No. 4 Desember 2021
- Mahmudi. 2013. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Nurliani, R., Fitriyah, N., & Burhanudin. 2018. Peran Kepala BUMDes Dalam Pengelolaan Badan Usah Milik Desa (BUMDes) di Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. E-Journal Ilmu Pemerintahan. Vol 6, No.4.
- Puspayanthi, N. L. P. A. D., Wahyuni, M. A., & Prayudi, A. M. 2017. Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Peran BUMDes Untuk Kemandirian Desa pada Desa di Kabupaten Jembrana. e-journal Universitas Pendidikan Ganesha. Vo. 8 No 2. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/13258>. Di unduh pada tanggal 9 Desember 2021
- Raba, M. 2006. Akuntabilitas, Konsep dan Iplementasi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Raharjo. & Mu'iz, M. 2021. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Yogyakarta: Gava Media.
- Sinarwati, N. K. 2021. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gelora Desa Membangun Indonesia, Yogyakarta: Expert.
- Srirejeki, K. 2018. Empowering the role of village owned enterprises (BUMDes) for rural development: case of Indonesia. Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi, 20(1), 5-10.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. (Cetakan Kesatu). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Valenia, M. J., Sabijono, H., & Gamaliel, H. 2017. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). Jurnal EMBA Vol 5 No. 2 Juni 2017. 1020-1030.